

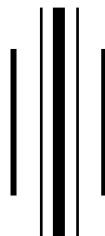


**NASKAH KARYA PERSEORANGAN (NKP)**

**TOPIK  
PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK  
TERHADAP PENINGKATAN CITRA POLRI**

**JUDUL**

**OPTIMALISASI PROFESIONALISME KINERJA PENYIDIK BARESKRIM  
POLRI GUNA MEMPERKUAT KUALITAS MANAJEMEN E-PENYIDIKAN  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN POLRI PRESISI**



**OLEH :**

**NAMA : TRI PUJI RAHARJO, S.E., M.Ak., M.H.  
NO. SERDIK : 202409002043  
POKJAR : VII**

---

**PESERTA DIDIK SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN  
T.A. 2024**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH**



**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI PUJI RAHARJO, S.E., M.Ak., M.H.

Pangkat/ NRP : KOMPOL

Nomor Serdik : 202409002043

Sebagai peserta didik Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian Tahun Anggaran 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Naskah Karya Perseorangan (NKP) / Naskah Karya Akhir Perseorangan (Naskap) yang saya tulis adalah asli;
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan NKP/Naskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Lembang, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



**TRI PUJI RAHARJO, S.E., M.Ak., M.H.**

**NO. SERDIK : 202409002043**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
1. Permasalahan.....	2
2. Pokok-pokok persoalan.....	2
C. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	3
1. Ruang Lingkup.....	3
2. Sistematika.....	3
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah.....	5
B. Kajian Teori.....	6
1. <i>Grand Theory</i> .....	6
2. <i>Middle Theory</i> .....	6
3. <i>Applied Theory</i> .....	7
C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.....	8
1. Mengumpulkan dan mengolah data.....	8
2. Analisis data/fakta.....	9
3. Metode penelitian.....	9

D. Kerangka Berpikir.....	10
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>11</b>
A. Kondisi Faktual Polri Presisi.....	11
B. Kondisi Faktual Kualitas Manajemen E-Penyidikan.....	12
C. Kondisi Faktual Profesionalisme Kinerja Penyidik Bareskrim Polri.....	13
1. Persoalan.....	14
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.....	18
<b>BAB IV PEMECAHAN MASALAH.....</b>	<b>22</b>
A. Analisis Strategi.....	22
1. Faktor Eksternal.....	22
2. Faktor Internal.....	23
3. Analisis Posisi Organisasi.....	25
4. Faktor Strategi.....	26
B. Formulasi Strategi.....	26
1. Visi.....	26
2. Misi.....	26
3. Tujuan.....	27
4. Kebijakan.....	27
5. Strategi.....	27
C. Implementasi Strategi.....	28
D. Evaluasi dan Pengendalian.....	33
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
A. Simpulan.....	36

B. Rekomendasi.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
ALUR PIKIR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
POLA PIKIR.....	xi
LAMPIRAN ES – OHA.....	xii
LAMPIRAN ANALISIS SWOT .....	xiii
LAMPIRAN AHP .....	xiv
LAMPIRAN MANAJEMEN RISIKO.....	xvi

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kasus Pelanggaran Personel Terkait Kegiatan Penyidikan Tahun 2021-2022
Tabel 3.2	Program Pengembangan SDM Fungsi Gakkum
Tabel 3.3	Data Sertifikasi Penyidik Bareskrim Polri
Tabel 3.4	Persentase jumlah personel yang membuat dokumen e-penyidikan
Tabel 6.1	<i>External Factors Analysis Summary</i>
Tabel 6.2	<i>Analytical Hierarchy Process</i> Faktor Eksternal
Tabel 6.3	<i>Internal Factors Analysis Summary</i>
Tabel 6.4	<i>Analytical Hierarchy Process</i> Faktor Internal
Tabel 6.5	<i>Strategic Factor Analysis Summary</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

ALUR PIKIR

POLA PIKIR

LAMPIRAN ES – OHA

LAMPIRAN ANALISIS SWOT

LAMPIRAN AHP

LAMPIRAN MANAJEMEN RISIKO

**TOPIK**  
**PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK**  
**TERHADAP PENINGKATAN CITRA POLRI**

**JUDUL**  
**OPTIMALISASI PROFESIONALISME KINERJA PENYIDIK**  
**DI BARESKRIM POLRI**  
**GUNA MEMPERKUAT KUALITAS MANAJEMEN E-PENYIDIKAN**  
**DALAM RANGKA MEWUJUDKAN POLRI PRESISI**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang.**

Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia. Dalam era perkembangan teknologi dan tantangan kejahatan yang semakin kompleks, Polri telah melakukan langkah-langkah transformasional untuk memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Polri adalah meluncurkan program Polri Presisi. Polri Presisi adalah konsep yang menggabungkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi informasi, dan manajemen berbasis data untuk memperkuat kinerja kepolisian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri

Dalam rangka mewujudkan Polri Presisi, Bareskrim Polri memiliki peran yang penting sebagai salah satu unit pelaksana di lingkungan Polri. Dengan mengadopsi prinsip Polri Presisi, Bareskrim Polri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas manajemen e-penyidikan dalam penyelenggaraan tugas penyidikan kepolisian. Melalui peningkatan kualitas manajemen e-penyidikan, Bareskrim Polri berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan sistem pendukung yang terintegrasi dalam proses penyidikan.



Dengan demikian, diharapkan proses penyidikan dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan berorientasi pada keadilan.

Namun, dalam pelaksanaannya dilapangan masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan sistem pendukung dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyidikan elektronik, infrastruktur yang kurang memadai, ancaman keamanan *cyber*, serta keterbatasan jumlah penyidik yang terlatih. Menyikapi hal tersebut, Bareskrim Polri perlu melakukan langkah sistematis dan konseptual melalui peningkatan profesionalisme penyidik secara sistematis dan berkelanjutan, dengan dukungan manajemen Bareskrim Polri serta kerjasama dari seluruh anggota dan pemangku kepentingan terkait. Dengan meningkatkan profesionalisme penyidik melalui langkah-langkah tersebut, Bareskrim Polri dapat memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan dan berkontribusi dalam mewujudkan Polri Presisi secara efektif.

## **B. Rumusan Masalah.**

### **1. Permasalahan.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah “Bagaimana profesionalisme kinerja Penyidik Bareskrim Polri agar kualitas manajemen e-penyidikan diperkuat sehingga Polri Presisi terwujud?”

### **2. Pokok-pokok persoalan.**

Dari permasalahan tersebut, maka dapat diambil suatu pokok-pokok persoalan berdasarkan hasil analisis *grand theory* pembinaan sebagaimana berikut:

2.1. Bagaimana kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek pengetahuan?

- 2.2. Bagaimana kinerja penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek keterampilan?
- 2.3. Bagaimana kinerja penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek integritas?

## **C. Ruang Lingkup dan Sistematika.**

### **1. Ruang Lingkup.**

- 1.1. Pembatasan ruang lingkup adalah bagaimana profesionalisme kinerja penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan dalam rangka terwujudnya Polri Presisi.
- 1.2. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri.
- 1.3. Waktu penelitian Oktober 2024 berdasarkan data tahun 2021 s.d 2023.
- 1.4. Batasan pembahasan meliputi deskripsi mengenai pengetahuan, keterampilan dan integritas guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan dalam rangka mewujudkan Polri Presisi.

### **2. Sistematika.**

#### **2.1 BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan diangkatnya judul, pokok-pokok persoalan, ruang lingkup penulisan serta sistematika.

#### **2.2 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai berbagai landasan teori dan konsep yang menjadi rujukan pembahasan penulisan untuk dapat memperbandingkan kesesuaian antara teori dan konsepsi terhadap permasalahan dan pokok-pokok persoalan yang dibahas.

2.3 BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi faktual sesuai judul penulisan dan berisi kondisi faktual pokok-pokok persoalan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.4 BAB IV : PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis strategi, formulasi strategi, implementasi strategis serta evaluasi dan pengendalian.

2.5 BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan rekomendasi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah.**

Citra dan performa Polri sering kali menjadi sorotan publik, terutama terkait proses penyidikan yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan efektif. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja penyidik guna mendukung terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Bareskrim Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri melalui peningkatan kualitas manajemen e-penyidikan. Optimalisasi kinerja penyidik dalam konteks ini tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga komitmen integritas dan transparansi.

Implementasi e-penyidikan menjadi salah satu inovasi digital yang telah diterapkan Polri untuk menjawab tantangan era digital dalam proses hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan penyidik, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi terhadap perubahan di kalangan penyidik. Kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut harus mencakup upaya optimalisasi profesionalisme kinerja penyidik Bareskrim Polri, di mana peningkatan kualitas dan kapabilitas penyidik dalam memanfaatkan teknologi menjadi prioritas utama guna meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

Untuk memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan, Polri perlu mengadopsi pendekatan strategis melalui pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, peningkatan infrastruktur digital, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih transparan. Pengembangan sistem manajemen yang berbasis digital harus diiringi dengan komitmen kuat dalam memastikan penyidik memiliki

kompetensi yang sesuai dengan tuntutan teknologi dan hukum yang berlaku. Dengan optimalisasi kinerja penyidik Bareskrim Polri melalui e-penyidikan, diharapkan dapat memperkuat citra dan performa Polri dalam mewujudkan keamanan dan keadilan yang lebih baik sesuai visi Polri Presisi.

## B. Kajian Teori.

### 1. *Grand Theory.*

*Grand Theory* yang digunakan dalam penulisan NKP ini adalah **Teori Profesionalitas** Menurut Moeljono (2003: 107) pengertian professional terdiri atas tiga unsur, yaitu *knowledge*, *skill*, *integrity*, dan selanjutnya ketiga unsur tersebut harus dilandasi dengan iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesediaan untuk belajar terus-menerus.

Teori di atas penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa pokok-pokok persoalan dalam penulisan NKP ini.

### 2. *Middle Theory.*

**2.1 Teori Pengetahuan.** Keraf (2001) berpendapat bahwa pengetahuan merupakan buah pikir, ide/gagasan, konsep serta pemahaman manusia yang kemudian dapat mengambil inisiatif untuk berbagai pengetahuan dengan berbagai metode gagasan, konsep, dan pemahaman. Teori ini penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa pokok persoalan pertama dalam NKP ini.

**2.2 Teori Keterampilan.** Menurut Gordon (1990) adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dimana kemampuan yang dimilikinya bentuk dari implementasi dari system pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas kegiatan. Teori ini penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa pokok persoalan kedua dalam NKP ini.

**2.3 Teori Integritas.** Menurut Adrian Gostick dan Dana Telford dalam Gea (2016) mengatakan bahwa integritas adalah ketaatan yang kuat terhadap sebuah kode (*code*),

khususnya nilai moral atau artistik tertentu. Teori ini penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa pokok persoalan ketiga dalam NKP ini.

### 3. ***Applied Theory.***

**3.1 Teori Pemahaman:** Anas Sudijono (2011:50) berpendapat bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

**3.2 Teori *Technical Skill*:** Menurut Robbins (2000) bahwa *technical skill* merupakan jenis keterampilan yang diperoleh dengan pembelajaran secara khusus dalam bidang Teknik.

**3.3 Teori Kepatuhan:** Kepatuhan atau *compliance* menurut Stanely Milgram (1963). Menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.

**3.4 Teori Motivasi:** Adair (2007 : 192) mengemukakan bahwa Motivasi adalah upaya yang membuat seseorang melakukan sesuatu dan benar-benar berusaha mencapai apa yang mereka lakukan. Secara konseptual motivasi dilahirkan secara intrinsik (dari diri sendiri) maupun secara ekstrinsik (didapatkan dari luar)

**3.5 Teori Analisis SWOT.** Albert Humphrey dalam Setyo Riyanto (2020 : 21) mendefinisikan bahwa analisis SWOT sesuai dengan namanya membagi situasi yang dihadapi oleh organisasi ke dalam 4 (empat) faktor utama, yaitu Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), keduanya adalah faktor yang dikelompokkan ke dalam lingkungan internal suatu organisasi. Sementara itu, dari sisi lingkungan eksternal organisasi, masing-masing terdiri atas faktor Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*).

**3.6 Teori *Analytic Hierarchy Process (AHP)*** merupakan sistem pengambilan keputusan dengan multi kriteria

dengan menggunakan software expert choice. Implementasi dari AHP adalah untuk merancang perencanaan strategis, pengalokasian sumber daya, kebijakan publik dan bisnis dan pembobotan dalam EFAS dan IFAS. Kemudian dirumuskan visi, misi organisasi, sasaran, tujuan, kebijakan, strategi, serta action plan (Setyo Riyanto, 2019).

**3.7 Teori Manajemen Strategis.** Manajemen strategik (*strategic management*) menurut Pearce and Robinson (20:1997), didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen strategi terdiri dari beberapa tugas penting yang mencakup: merumuskan visi organisasi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta memilih seperangkat strategi.

**3.8 Teori Manajemen Risiko.** Menurut ISO 31000:2018 *Risk Management Guideline* proses manajemen risiko adalah proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik terkait aktivitas komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan cakupan, konteks, dan kriteria risiko, pelaksanaan penilaian risiko (*risk assessment*) yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko (*risk treatment*), pemantauan dan peninjauan, perekaman, dan pelaporan.

## C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

### 1. Mengumpulkan dan mengolah data.

Dalam proses pengumpulan data pada penulisan ini, pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal sangat berperan dalam pemecahan masalah. Pengaruh lingkungan ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep *strategic analysis* yang meliputi *Environmental Scanning* (ES) dan *Organization Health Audit* (OHA). *Tools* yang digunakan untuk

menganalisis pengaruh lingkungan eksternal (ES) adalah PESTEL (*Politic, Economy, Social, Technology, Enviromental dan Legal*) serta SDO (sumber daya organisasi) melalui 4M (*man, money, material, method*) untuk menganalisis pengaruh lingkungan internal (OHA).

## **2. Analisis data/fakta.**

Selanjutnya dari data yang didapatkan, kemudian dianalisis menggunakan konsep analisis SWOT dengan memilih faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap organisasi, melalui berbagai fakta lingkungan eksternal maupun internal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi.

## **3. Metode penelitian.**

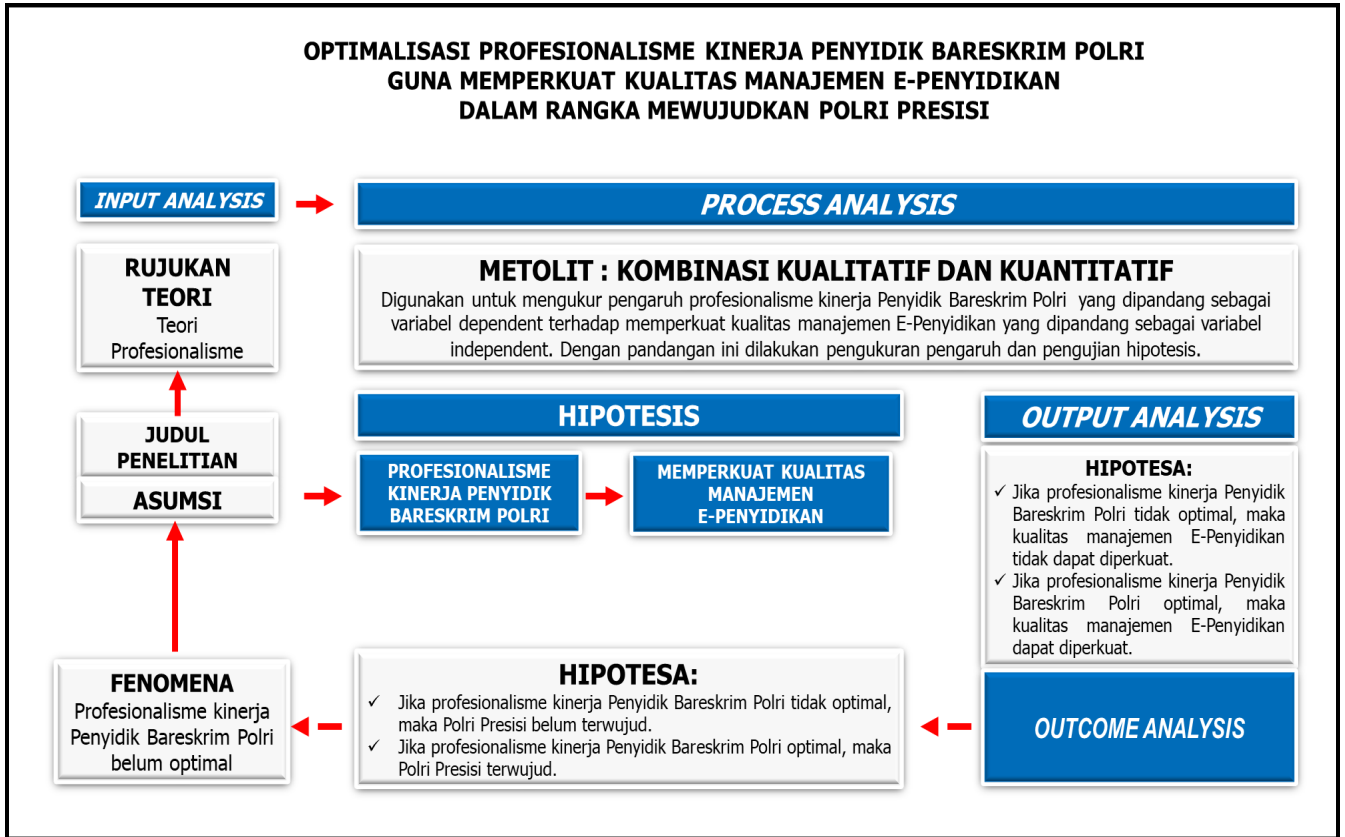
Dalam pembuatan NKP ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu fenomena atau kejadian. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan fenomena atau kejadian yang diteliti, lalu menganalisis data yang dilakukan melalui:

- 3.1 Studi empiris, yakni pencatatan dan menggali pengalaman penulis selama bertugas di wilayah hukum Bareskrim Polri.
- 3.2 Studi Kepustakaan berupa buku, bahan bacaan lainnya.
- 3.3 Studi terhadap data-data yang ada di Bareskrim Polri.
- 3.4 Triangulasi data serta meminta *expert opinion*.



D. Kerangka Berpikir.

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



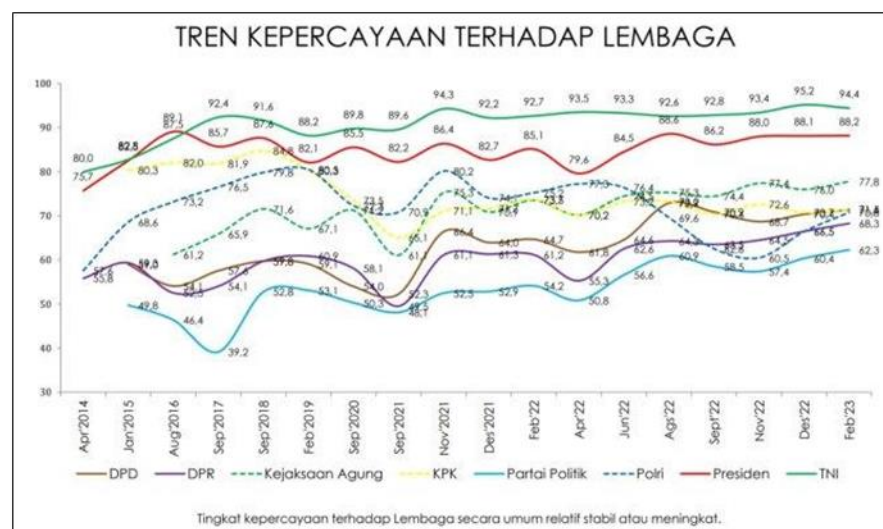
### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Faktual Polri Presisi.

Salah satu *concern* dari Polri Presisi adalah menyelenggarakan transformasi Polri di bidang pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efisiensi melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi, serta terintegrasi. Selain itu guna mendukung transformasi pelayanan, Polri melakukan pemberdayaan teknologi dan analisis data melalui penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif, pemanfaatan teknologi forensik digital dalam penyidikan kriminalitas serta manajemen penyidikan secara elektronik sehingga meningkatkan kemampuan Polri dalam memproses dan menganalisis data guna mendukung tindakan preventif dan investigasi yang lebih efisien. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sebagaimana dapat diamati pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Tren Kepercayaan Terhadap Polri Presisi



Sumber: Indikator Politik Indonesia, 2023

Berdasarkan gambar di atas, hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada periode Februari-Maret 2023 mengungkapkan tingkat kepercayaan terhadap Polri meningkat dan berada di angka 77,8 persen.

## B. Kondisi Faktual Kualitas Manajemen E-Penyidikan.

Manajemen penyidikan secara elektronik merujuk pada perkembangan teknologi informasi yang telah membawa dampak signifikan dalam proses penyidikan kepolisian. Dengan adanya manajemen penyidikan secara elektronik atau e-penyidikan, penyidik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses penyidikan. E-penyidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas penyidikan dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi yang diperlukan. Sistem manajemen informasi yang terintegrasi memungkinkan penyidik untuk mengelola berbagai jenis data, mulai dari data kependudukan, data kriminal, data forensik, hingga data komunikasi elektronik. Hal ini dapat mempercepat proses identifikasi, analisis, dan penentuan keputusan dalam penyidikan. Adapun fitur-fitur terkait e-penyidikan dapat di amati pada gambar berikut:

Gambar 3.2

### Tampilan Layar E-Penyidikan



Sumber: Aplikasi E-Penyidikan Bareskrim Polri, 2023.

Dari gambar di atas, dapat diamati aplikasi e-penyidikan memiliki fitur-fitur yang dapat membantu dan memudahkan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, e-penyidikan juga mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara penyidik, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Pertukaran informasi yang cepat dan akurat antar instansi dapat meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus dan memperkuat integritas serta keadilan dalam proses penyidikan.

### **C. Kondisi Faktual Profesionalisme Kinerja Penyidik Bareskrim Polri.**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan kepolisian. Profesionalisme kinerja penyidik menjadi faktor kunci dalam menjamin integritas, keberlanjutan, dan keberhasilan penyidikan. Di era digital ini, manajemen e-penyidikan telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penyidikan termasukhalnya di Bareskrim Polri.

Manajemen e-penyidikan memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat kinerja Penyidik Bareskrim Polri. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen yang terintegrasi, manajemen e-penyidikan memungkinkan penyidik untuk mengoptimalkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran informasi yang relevan dalam penyidikan. Namun, dalam mengimplementasikan manajemen e-penyidikan, Bareskrim Polri juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi keamanan data, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan yang memadai bagi penyidik dalam penggunaan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Bahkan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus memberikan *punishment* terhadap personel yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Kasus Pelanggaran Personel Terkait Kegiatan Penyidikan  
Tahun 2021-2022

No	Pelanggaran	Tahun		Ket
		2021	2022	
1	Pelanggaran Disiplin	2	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

Sumber: Laporan Anev Dittipideksus, 2022

Dari tabel di atas terlihat adanya beberapa kasus pelanggaran terkait kinerja penyidikan yang dilakukan personel, dugaan pelanggaran disiplin. Walaupun laporan tersebut menurun dari tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kasus menjadi 1 (satu) kasus di tahun 2022, namun laporan tersebut mencerminkan bahwa Profesionalisme kinerja penyidik belum optimal.

#### 1. Persoalan.

##### 1.1 Kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek pengetahuan.

Aspek pengetahuan memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat manajemen e-penyidikan. Penyidik yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknologi informasi dan sistem manajemen e-penyidikan akan mampu mengoptimalkan penggunaan alat-alat dan metode digital dalam penyidikan. Bareskrim Polri telah melaksanakan program peningkatan pengetahuan terhadap personel fungsi Gakkum, sebagaimana dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Program Pengembangan SDM Fungsi Gakkum

No	Pengembangan SDM		Jml
	Prolat	Dikbangspes	
1	-	Bahasa Inggris	1
2	Pemanfaatan teknologi	-	1
3	<i>Money Laundering</i>	Lidik sidik, Intel	2
4	Pemilu, Riksa, Polmas, Berkas Perkara	Tipiring	3
5	<i>Cyber Patrol</i>	<i>Cyber Crime</i> , Tipikor, Perbankan	2
	Jumlah		9

Sumber: Lapsat Bareskrim Polri, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak semua personel yang sudah mendapatkan program pengembangan melalui pendidikan spesialis maupun pelatihan. Tahun 2022 jumlahnya hanyalah 9 (sembilan) personel. Bahkan khusus untuk ilmu pemanfaatan teknologi, yang baru mengikuti baru sebanyak 2 (dua) personel saja, sehingga mempengaruhi kinerja penyidik sebagaimana berikut:

- 1.1.1 Belum semua penyidik / penyidik pembantu mengetahui dan memahami tentang pemanfaatan aplikasi manajemen e-penyidikan dari tahap penyelidikan sampai berkas P-21.
- 1.1.2 Penyidik / penyidik pembantu belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang merata dalam menangani suatu perkara pidana dengan menerapkan manajemen e-penyidikan.
- 1.1.3 Sebagian penyidik / penyidik pembantu masih memiliki pengetahuan hukum yang lemah, sehingga kurang memahami peraturan perundang-undangan sehingga kurang mencerminkan sosok penyidik yang profesional dan akan mempengaruhi hasil penyidikan dan input data yang dibuat.

## 1.2 Kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek keterampilan.

Salah satu aspek yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyidikan di Bareskrim Polri adalah keterampilan penyidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen e-penyidikan. Keterampilan yang diperlukan oleh penyidik meliputi pelatihan teknis, kemampuan analisis data, keterampilan komunikasi digital, keterampilan manajemen data, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja secara tim. Namun fakta di lapangan, penyidik maupun penyidik pembantu di Bareskrim Polri belum seluruhnya telah tersertifikasi, sebagaimana dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Data Sertifikasi Penyidik Bareskrim Polri

NO	TAHUN	SUDAH SERTIFIKASI	KET
1	2021	11	
2	2022	13	
3	2023	6	
	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	

NO	JML PERS	SUDAH SERTIFIKASI	BLM SERTIFIKASI	%
1	125	30	95	24

Sumber: Lapsat Bareskrim Polri, 2023

Dari tabel di atas, Bareskrim Polri telah melaksanakan sertifikasi terhadap penyidik untuk meningkatkan keterampilan dalam kegiatan penyidikan, namun dari 129 personel baru sebanyak 30 personel saja yang telah mengikuti sertifikasi atau baru sebanyak 37,5% sehingga kinerja penyidik belum optimal diamati dari kondisi berikut:

1.2.1 Sebagian penyidik / penyidik pembantu kurang memiliki kemampuan dan belum terampil dalam mengoperasikan aplikasi e-manajemen penyidikan

khususnya dalam meng-input data secara mandiri sehingga masih mengandalkan keberadaan operator yang kinerja dan jumlahnya terbatas.

1.2.2 Masih kurangnya keahlian / keterampilan sebagian penyidik / penyidik pembantu terkait teknis dan taktis penyidikan tindak pidana sehingga terkadang terjadi pelanggaran prosedur teknis dan taktis karena belum tersertifikasi.

### 1.3 Kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek integritas.

Dalam konteks kinerja penyidik guna memperkuat manajemen e-penyidikan, integritas berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap teknologi informasi dalam proses penyidikan serta mengoptimalkan manajemen e-penyidikan untuk mencapai tujuan penyidikan yang efektif dan adil. Berikut adalah hasil analisa dan evaluasi terhadap kinerja penyidik dalam penggunaan manajemen e-penyidikan:

Tabel 3.4  
Persentase jumlah personel yang membuat dokumen e-penyidikan

No	Jml Anggota yg dpt membuat dokumen	Jml dokumen	Rata-rata dokumen per-anggota	Anggt yg buat dokumen	
				Jml	%
1	41	796	19,41	32	78
2	27	363	13,44	19	70

Sumber: Lapsat Bareskrim Polri, 2023

Berdasarkan rata-rata pembuatan dokumen e-penyidikan pada tabel di atas, sekitar 78% personel telah membuat atau menggunakan aplikasi manajemen e-penyidikan, namun hal tersebut masih belum optimal diamati dari kondisi pembuatan dokumen melalui aplikasi e-manajemen penyidikan pada masing-masing Satfungs



Gakkum di Bareskrim Polri, dilihat dari presentasinya telah diimplementasikan oleh penyidik namun belum maksimal, sehingga berpengaruh terhadap integritas personel dalam memastikan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap teknologi informasi dalam proses penyidikan serta mengoptimalkan manajemen e-penyidikan untuk mencapai tujuan penyidikan yang efektif dan adil, sebagaimana berikut:

1.3.1 Dalam pemanfaatan aplikasi e-Manajemen Penyidikan, penyidik kurang intensif melakukan input dan *update* data, sehingga masyarakat / pelapor tidak mengetahui sejauh mana hasil perkembangan penyidikan terhadap kasus yang ditangani penyidik yang dapat dipantau masyarakat melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) secara *online*.

1.3.2 Pembuatan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan aplikasi e-Manajemen Penyidikan sudah diaplikasikan oleh anggota Bareskrim Polri, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara konsisten dan komprehensif.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.**

### **2.1 Faktor Eksternal.**

#### **2.1.1 Peluang.**

- a. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan Polri di bidang penegakan hukum mendorong Polri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyidikan.
- b. Terbukanya kerjasama dengan Kejaksaan dalam mendukung penyelesaian berkas perkara pidana.

- c. Adanya kontrol eksternal dari, Kompolnas, Komnas HAM, serta LSM, yang dapat memotivasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri khususnya fungsi reskrim.
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kualitas penyidikan dan kinerja penyidik.
- e. Penyelenggaraan reformasi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi dan kelembagaan pemerintah termasuk Polri.

#### 2.1.2 Ancaman.

- a. Kurang terjalin kerjasama dengan CJS (*Criminal Justice System*) dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga menciderai rasa keadilan hukum masyarakat.
- b. Perkembangan Lingstra baik nasional, regional maupun global menyebabkan munculnya kejahatan yang semakin kompleks.
- c. Masih berkembangnya penilaian negatif / *lebelling* masyarakat termasuk masih tingginya komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik Polri.
- d. Masih adanya birokrasi yang rumit dari instansi tertentu yang menghambat kecepatan proses penyidikan tindak pidana dan penyelesaian perkara.
- e. Masih adanya upaya masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan penyimpangan/ menyalahgunakan wewenang.

## 2.2 Faktor Internal.

### 2.2.1 Kekuatan.

- a. Program prioritas Kapolri salah satunya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas dan mewujudkan penyidik yang professional.
- b. Komitmen pimpinan Polri sesuai penjabaran visinya untuk menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- c. Modernisasi dalam layanan publik berbasis teknologi yang direalisasikan melalui penerapan e-manajemen penyidikan yang terintegrasi di semua level satwil.
- d. Telah adanya fungsi-fungsi pembinaan SDM baik secara struktural maupun fungsional mulai dari tingkat Mabes, Polda sampai ke tingkat Polres guna meningkatkan kualitas anggota Polri.
- e. Diberikan kesempatan kepada seluruh penyidik untuk pengembangan kompetensi baik melalui pendidikan maupun pelatihan.

### 2.2.2 Kelemahan.

- a. Belum semua penyidik memahami secara komprehensif tentang tata cara pemanfaatan aplikasi e-manajemen penyidikan dari tahap penyelidikan sampai berkas P-21.
- b. Anggota masih terjebak dalam budaya kerja lama yang masih memanfaatkan sistem manual dalam membuat produk administrasi penyidikan.
- c. Penerapan e-Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Bareskrim Polri selama ini masih belum

se penuhnya berjalan secara transparan dan kompetitif.

- d. Kurangnya kualifikasi pendidikan kejuruan para penyidik pelatihan khusus dalam membuat administrasi penyidikan menggunakan aplikasi e-manajemen penyidikan.
- e. Sebagian Penyidik Bareskrim Polri masih banyak yang belum memiliki sertifikasi / belum lulus dalam mengikuti uji kompetensi guna mewujudkan sumber daya penyidik yang professional.

## BAB IV PEMECAHAN MASALAH

### A. Analisis Strategi.

Dalam upaya pemecahan masalah pada NKP ini, sebelum langkah-langkah strategis ditetapkan, diawali dengan analisis faktor-faktor strategis yang terpilih baik internal maupun eksternal melalui analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana berikut:

#### 1. Faktor Eksternal

##### 1.1 *External Factors Analysis Summary (EFAS).*

Dalam EFAS disajikan analisis kondisi eksternal organisasi mulai dari pembobotan, peratingan hingga didapatkan skor untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki, sebagaimana berikut:

Tabel 6.1

*External Factors Analysis Summary*

NO	PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	BOBOT	RATING	SKOR
A	Tuntutan masy yg semakin tinggi	0,100	7	0,700
B	Terbukanya kerma dgn CJS / Kejaksaan	0,112	8	0,896
C	Kontrol eksternal thdp kinerja penyidik	0,089	7	0,623
D	Perkembangan IPTEK	0,108	7	0,756
E	Reformasi nasional jadi dasar Reformasi Polri	0,091	6	0,546
<b>JUMLAH</b>		0,500		3,521

NO	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )	BOBOT	RATING	SKOR
A	Kurang sinergi CJS	0,095	3	0,285
B	Perkembangan lingstra	0,129	4	0,516
C	Penilaian negative masyarakat	0,095	2	0,190
D	Birokrasi rumit instansi tertentu dlm proses sidik	0,102	3	0,306
E	Msh ada upaya masy pengaruhi penyidik	0,079	3	0,237
<b>JUMLAH</b>		0,500		1,534
<b>TOTAL</b>		1,000		<b>5,055</b>

## 1.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Eksternal.

Metode (*tools*) yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi fakta lingkungan eksternal adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2

### Analytical Hierarchy Process Faktor Eksternal

NO	PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
A	Tuntutan masy yg semakin tinggi	1,00	7/8	8/7	7/8	7/6	0,100	7	0,700
B	Terbukanya kerma dgn CJS / Kejaksaan	8/7	1,00	8/7	7/6	7/6	0,112	8	0,896
C	Kontrol eksternal thdp kinerja penyidik	7/8	7/8	1,00	7/8	6/7	0,089	7	0,623
D	Perkembangan IPTEK	8/7	6/7	8/7	1,00	8/6	0,108	7	0,756
E	Reformasi nasional jadi dasar Reformasi Polri	6/7	6/7	7/6	6/8	1,00	0,091	6	0,546
<b>JUMLAH</b>							<b>0,500</b>		<b>3,521</b>

NO	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
A	Kurang siner CJS	1,00	2/3	2/3	3/2	4/3	0,095	3	0,285
B	Perkembangan lingstra	3/2	1,00	4/2	2/3	4/2	0,129	4	0,516
C	Penilaian negative masyarakat	3/2	2/4	1,00	3/2	2/3	0,095	2	0,190
D	Birokrasi rumit instansi tertentu dlm proses sidik	2/3	3/2	2/3	1,00	3/2	0,102	3	0,306
E	Msh ada upaya masy pengaruhi penyidik	3/4	2/4	3/2	2/3	1,00	0,079	3	0,237
<b>JUMLAH</b>							<b>0,500</b>		<b>1,524</b>
<b>TOTAL</b>							<b>1,000</b>		<b>5,055</b>

Berdasarkan hasil analisis dari *analitical hierarchy process* (AHP) faktor eksternal yang dapat diamati pada tabel 6.1 dan 6.2 total skor bobot pada faktor peluang dan ancaman adalah 5,055.

## 2. Faktor Internal

### 2.1 Internal Factors Analysis Summary (IFAS).

Dalam IFAS disajikan analisis kondisi eksternal organisasi mulai dari pembobotan, peratingan hingga didapatkan skor untuk menentukan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sebagaimana berikut:

Tabel 6.3  
Internal Factors Analysis Summary

NO	KEKUATAN (STRENGTHS)	BOBOT	RATING	SKOR
A	Program prioritas Kapolri	0,109	7	0,763
B	Komitmen pimpinan Polri	0,105	8	0,840
C	Modernisasi layanan publik berbasis teknologi	0,084	7	0,588
D	Fungsi-fungsi pembinaan SDM	0,099	7	0,693
E	Kesempatan pengembangan kompetensi	0,103	7	0,721
<b>JUMLAH</b>		0,500		3,521

NO	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	BOBOT	RATING	SKOR
A	Blm pahami scr komprehensif e-jemen sidik	0,110	4	0,440
B	Anggt msh terjebak budaya lama buat dikumen	0,087	3	0,261
C	E-manajemen sidik blm transparan & kompetitif	0,115	3	0,345
D	Krg kualifikasi dikjur dan pelatihan khusus	0,093	2	0,186
E	Sbagian besar penyidik blm miliki ser	0,095	2	0,190
<b>JUMLAH</b>		0,500		1,519
<b>TOTAL</b>		1,000		5,011

### 2.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal.

Metode (*tools*) yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi fakta lingkungan internal adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4  
Analytical Hierarchy Process Faktor Internal

NO	KEKUATAN (STRENGTHS)	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
A	Program prioritas Kapolri	1,00	8/7	8/6	7/6	7/8	0,109	7	0,763
B	Komitmen pimpinan Polri	7/8	1,00	8/7	7/6	8/7	0,105	8	0,840
C	Modernisasi layanan publik berbasis teknologi	6/8	7/8	1,00	7/8	6/8	0,084	7	0,588
D	Fungsi-fungsi pembinaan SDM	6/7	6/7	8/7	1,00	8/7	0,099	7	0,693
E	Kesempatan bang kompetensi	8/7	7/8	8/6	7/8	1,00	0,103	7	0,721
<b>JUMLAH</b>							0,500		3,492

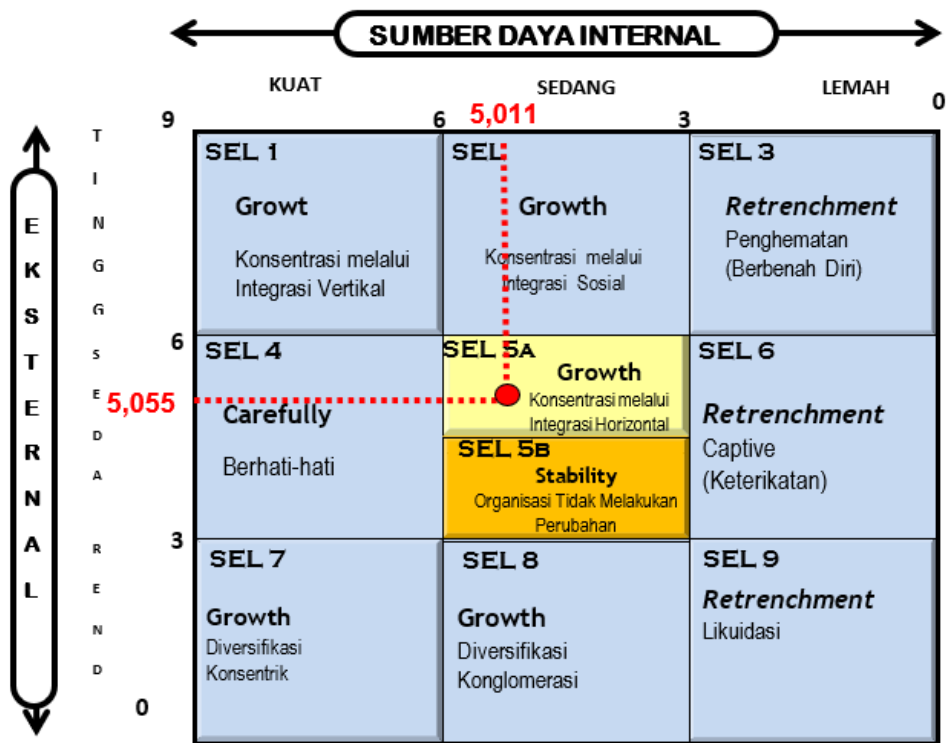
NO	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
A	Blm pahami scr komprehensif e-jemen sidik	1,00	4/3	3/2	3/2	2/3	0,110	4	0,440
B	Terjebak budaya lama buat dikumen	3/4	1,00	2/3	3/2	3/4	0,087	3	0,261
C	E-manajemen sidik blm transparan & kompetitif	2/3	3/2	1,00	3/2	3/2	0,115	3	0,345
D	Krg kualifikasi dikjur dan pelatihan khusus	2/3	2/3	2/3	1,00	4/2	0,093	2	0,186
E	penyidik blm miliki sertifikasi	3/2	4/3	2/3	2/4	1,00	0,095	2	0,190
<b>JUMLAH</b>							0,500		1,519
<b>TOTAL</b>							1,000		5,011

Berdasarkan hasil analisis dari *analytical hierarchy process* (AHP) faktor internal yang dapat diamati pada tabel 6.3 dan 6.4 total skor bobot pada faktor kekuatan dan kelemahan adalah 5,011.

**3. Analisis Posisi Organisasi.**

Posisi organisasi digunakan untuk menentukan pola atau strategi umum yang akan dilakukan suatu organisasi agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun hasil analisis posisi organisasi dalam NKP ini adalah sebagai berikut:

Gambar 6.1  
Posisi Organisasi



Dari skor IFAS adalah 5,027 dan skor EFAS adalah 5,015 maka diperoleh posisi organisasi pada sel 5a sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6.1.



#### 4. Faktor Strategi

Tabel 4.5

##### *Strategic Factor Analysis Summary*

No.	FAKTOR STRATEGIS KUNCI	BOBOT	RATING	SCORE	JANGKA		
					JPD	JSD	JPJ
1	Mengimplementasikan program prioritas Kapolri mewujudkan SDM Polri yang unggul	0,109	7	0,763			
2	Mengoptimalkan modernisasi layanan publik berbasis teknologi	0,084	7	0,588			
3	Meningkatkan kemampuan penyidik dlm menggunakan aplikasi e-jemen sidik	0,110	4	0,440			
4	Mengoptimalkan penerapan e-manajemen penyidikan secara transparan dan kompetitif	0,115	3	0,345			
5	Meningkatkan profesionalisme melalui Sertifikasi seluruh penyidik	0,095	2	0,190			
6	Merealisasikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri di bid gakkum	0,100	7	0,700			
7	Meningkatkan kerma dengan Kejaksaan	0,112	8	0,896			
8	Meningkatkan sinergi dengan CJS	0,095	3	0,285			
9	Meningkatkan persepsi positif masyarakat thdp kinerja penyidik	0,095	2	0,190			
10	Mengantisipasi pengaruh masy terjadinya lahun wewenang oleh penyidik	0,079	3	0,237			

#### B. Formulasi Strategi.

##### 1. Visi.

“Terwujudnya Polri Presisi dengan memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan melalui optimalisasi profesionalisme kinerja Penyidik Bareskrim Polri”

##### 2. Misi.

- 2.1 Meningkatkan pengetahuan terhadap kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan;
- 2.2 Meningkatkan keterampilan terhadap kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan;

- 2.3 Meningkatkan integritas terhadap kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan;

### **3. Tujuan.**

- 3.1 Tercapainya peningkatan pengetahuan terhadap kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan;
- 3.2 Tercapainya peningkatan keterampilan terhadap kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan;
- 3.3 Tercapainya peningkatan integritas terhadap kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan;

### **4. Kebijakan**

Mengoptimalkan profesionalisme kinerja penyidik dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perpol No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan dalam rangka mewujudkan Polri Presisi.

### **5. Strategi.**

Berdasarkan analisis EFAS dan IFAS posisi organisasi diperoleh pada sel 5a sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6.1. Respon organisasi dalam menghadapi situasi organisasi adalah *Horizontal Integration Strategy* yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi terhadap pihak-pihak atau *stakeholder* yang memiliki sumber daya guna mendukung program-program kepolisian. Sehingga kata kerja operasional yang digunakan dalam judul yaitu: "Optimalisasi"

### C. Implementasi Strategi.

Implementasi strategi merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dengan mempedomani strategi utama hasil analisis SFAS, sebagai berikut :

#### 1. Jangka Pendek (0 – 3 Bulan)

1.1 Strategi : Meningkatkan kemampuan penyidik dalam menggunakan aplikasi e-manajemen penyidikan.

1.1.1 Sasaran : Kemampuan penyidik ditingkatkan dalam penggunaan aplikasi e-manajemen penyidikan.

1.1.2 Program.

- a. Penyelenggaraan Dikbangspes dan pelatihan khusus untuk meningkatkan ketrampilan penyidik dalam membuat berkas dokumen penyidikan menggunakan aplikasi e-manajemen penyidikan.
- b. Penyelenggaraan *couching clinic* pembinaan teknis terhadap penyidik tentang sistem manajemen e-penyidikan untuk memudahkan proses penyidikan yang lebih efektif, akurat dan modern sehingga terwujudnya sosok penyidik yang profesional.

1.1.3 Indikator Kinerja Program.

- a. Terlaksananya Dikbangspes dan pelatihan khusus.
- b. Terlaksananya *couching clinic* pembinaan teknis terhadap penyidik tentang sistem manajemen e-penyidikan.

1.2 Strategi: Mengoptimalkan penerapan e-manajemen penyidikan secara transparan dan kompetitif.

1.2.1 Sasaran : Penerapan e-manajemen penyidikan dioptimalkan secara transparan dan kompetitif.

1.2.2 Program.

- a. Pelaksanaan sistem pengendalian perkara secara elektronik melalui SP2HP online didukung data

- yang valid dan *up to date* dan konsisten serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/pelapor untuk mengetahui perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan literasi melalui berbagai media (banner, pamflet, media massa, medsos) kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memanfaatkan aplikasi e-manajemen penyidikan yang dimiliki Bareskrim Polri sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik.

#### 1.2.3 Indikator Kinerja Program

- a. Terlaksananya sistem pengendalian perkara secara elektronik melalui SP2HP *online*.
- b. Terlaksananya sosialisasi dan literasi melalui berbagai media.

### 1.3 Strategi: Meningkatkan profesionalisme melalui Sertifikasi seluruh penyidik Bareskrim Polri.

#### 1.3.1 Sasaran: Profesionalitas penyidik Bareskrim Polriditingkatkan melalui sertifikasi.

#### 1.3.2 Program.

- a. Penyelenggaraan proses standarisasi berbasis kompetensi dalam rangka sertifikasi.
- b. Kolaborasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan dari internal Polri untuk menjadi Asesor dalam proses sertifikasi penyidik.

#### 1.3.3 Indikator Kinerja Program

- a. Terlaksananya proses standarisasi berbasis kompetensi dalam rangka sertifikasi.
- b. Adanya Kolaborasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan dari internal Polri untuk menjadi Asesor dalam proses sertifikasi penyidik.

1.4 Strategi: Meningkatkan sinergitas dengan CJS (*Criminal Justice System*).

1.4.1 Sasaran: Kualitas uji kompetensi penyidik ditingkatkan untuk memperluas perspektif.

1.4.2 Program.

- a. Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat formal maupun seremonial untuk memelihara komunikasi, menciptakan koordinasi dan sinergitas serta menyamakan persepsi dalam penanganan perkara secara terpadu.
- b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi antara Bareskrim Polridengan instansi terkait dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berkeadilan bagi masyarakat sebagai subyek hukum.

1.4.3 Indikator Kinerja Program

- a. Terselenggaranya kegiatan yang bersifat formal maupun seremonial untuk memelihara komunikasi, menciptakan koordinasi dan sinergitas serta menyamakan persepsi.
- b. Adanya peningkatan koordinasi dan konsultasi antara Bareskrim Polridengan instansi terkait.

## **2. Jangka Sedang (0 – 6 Bulan)**

2.1 Strategi: Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan dalam mendukung penyelesaian berkas perkara pidana.

2.1.1 Sasaran: Kerjasama dengan Kejaksaan ditingkatkan untuk mendukung penyelesaian berkas perkara pidana.

2.1.2 Program.

- a. Koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana.

- b. Merealisasikan e-manajemen penyidikan yang saling terintegrasi antara Polri dengan Kejaksaan.

#### 2.1.3 Indikator Kinerja Program.

- a. Terlaksananya fungsional antara penyidik Polri dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing.
- b. Terealisasinya e-manajemen penyidikan yang saling terintegrasi antara Polri dengan Kejaksaan.

### 2.2 Strategi: Meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja penyidik.

#### 2.2.1 Sasaran : Persepsi positif masyarakat ditingkatkan terhadap kinerja penyidik.

#### 2.2.2 Program.

- a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan.
- b. Menjunjung tinggi HAM dan kepastian hukum dalam proses penyidikan.

#### 2.2.3 Indikator Kinerja Program.

- a. Terselenggaranya peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan.
- b. Terselenggaranya proses penyidikan yang menjunjung tinggi HAM dan kepastian hu.

### 2.3 Strategi: Mengantisipasi pengaruh masyarakat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

#### 2.3.1 Sasaran : Pengaruh masyarakat diantisipasi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

#### 2.3.2 Program.

- a. Menjaga integritas dan dedikasi dalam setiap pelaksanaan tugas yang diemban penyidik.
- b. Peningkatan pengawasan melekat dan pengawasan struktural dalam proses penyidikan.

### 2.3.3 Indikator Kinerja Program.

- a. Terjaganya integritas dan dedikasi dalam setiap pelaksanaan tugas yang diemban penyidik.
- b. Adanya peningkatan pengawasan melekat dan pengawasan struktural dalam proses penyidikan.

## 3. Jangka Panjang (0 – 12 Bulan)

3.1 Strategi : Implementasi program prioritas Kapolri mewujudkan SDM Polri yang unggul.

3.1.1 Sasaran : program prioritas Kapolri diimplementasikan untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul.

3.1.2 Program.

- a. Menciptakan *smart system* dengan mempersiapkan sumber daya Bareskrim Polri khususnya penyidik yang siap memasuki era teknologi dan digitalisasi.
- b. Mengembangkan talenta Polri dengan cara identifikasi, pengembangan dan pembinaan (*Assesment/Talent Pool*).

3.1.3 Indikator Kinerja Program.

- a. Terciptanya *smart system* dengan mempersiapkan sumber daya.
- b. Terselenggaranya pengembangan talenta Polri dengan cara identifikasi, pengembangan dan pembinaan (*Assesment/Talent Pool*).

3.2 Strategi : Mengoptimalkan modernisasi layanan publik berbasis teknologi melalui penerapan e-manajemen.

3.2.1 Sasaran : Modernisasi layanan publik berbasis teknologi dioptimalkan melalui penerapan e-manajemen.

3.2.2 Program.

- a. Pengembangan dukungan sarana dan prasarana teknologi baik *software* (aplikasi) maupun *hardware* (perangkat komputer, jaringan internet)

yang memadai untuk mendukung e-manajemen penyidikan.

- b. Pengembangan aplikasi e-manajemen penyidikan yang mudah diakses dan bersifat terbuka untuk digunakan masyarakat.

### 3.2.3 Indikator Kinerja Program.

- a. Terselenggaranya pengembangan dukungan sarana dan prasarana teknologi.
- b. Terselenggaranya aplikasi e-manajemen penyidikan yang mudah diakses dan bersifat terbuka untuk digunakan masyarakat.

3.3 Strategi : Merealisasikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri di bidang penegakan hukum.

3.3.1 Sasaran : Tuntutan masyarakat direalisasikan terhadap pelayanan Polri di bidang penegakan hukum.

### 3.3.2 Program.

- a. Pemberian SP2HP *online* secara konsisten dengan dukungan data yang valid kepada masyarakat/pelapor guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik.
- b. Responsif dalam menerima dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, tidak berbelit-belit serta memberikan kepastian hukum.

### 3.3.3 Indikator Kinerja Program.

- a. Terlaksananya Pemberian SP2HP *online* secara konsisten.
- b. Responsifnya penerimaan laporan setiap masyarakat.

## D. Evaluasi dan Pengendalian.

### 1. Komunikasi dan Konsultasi;

Kegiatan komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh pimpinan dan pegawai lingkungan Kementerian/lembaga. Adapun



kegiatan yang dilakukan yaitu rapat berkala, rapat insidentil, *Focus Group Discussion*, serta membangun sistem informasi Manajemen Risiko yang memuat kegiatan membangun budaya risiko, review Manajemen Risiko, *Update Data* serta pelaporan. Adapun terkait timeline kegiatan tersebut dapat dilihat pada (lampiran Tabel Komunikasi dan Konsultasi)

2. Penetapan Konteks;

Konteks Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yaitu terkait Optimalisasi profesionalisme kinerja Penyidik Bareskrim Polri, dengan Jabatan pemilik Risiko diisi oleh Kasubdit Tipideksus, dan pengelola risiko adalah Kasubbbag Renmin, Unit Organisasi yang menerapkannya adalah Bareskrim Polri dengan ruang lingkup penerapan terkait meningkatkan profesionalisme kinerja penyidik dan periode penerapan dari Oktober-Desember 2024. Adapun yang menjadi sasaran organisasi yaitu tercapainya profesionalisme kinerja penyidik dengan indikator sasaran memuat tercapainya keterampilan. Selain itu terdapat proses bisnis yaitu memuat strategi terkait pemantapan manajemen kinerja penyidik pada personel. Adapun pemangku kepentingan terdiri dari Satuan Atas dan instansi samping. Selain itu terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Perpol No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

3. Identifikasi Risiko;

Identifikasi risiko terkait proses bisnis yang diambil yaitu terkait risiko kebijakan yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak terhadap organisasi. dalam identifikasi risiko memuat profil risiko dan peta risiko (terlampir).

4. Analisis Risiko;

Analisis risiko bertujuan untuk menentukan besaran dan level risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko

berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.

5. Evaluasi Resiko;

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, besaran/level risiko residual harapan, keputusan mitigasi risiko dan indikator risiko utama (terlampir).

6. Mitigasi Resiko;

Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko utama hingga mencapai risiki residual harapan. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memiliki opsi mitigasi risiko, menyusun rencana mitigasi risiko dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut dengan tahapan memilih opsi mitigasi risiko, serta menyusun rencana mitigasi risiko (terlampir)

7. Pemantauan dan Reviu.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dentgan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dan reviu risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko dengan tahapan pemantauan, reviu, audit Manajemen Risiko, serta Tatakelola Manajemen Risiko (terlampir).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek pengetahuan tidak optimal hal tersebut berdasarkan kondisi belum semua penyidik / penyidik pembantu mengetahui dan memahami tentang pemanfaatan aplikasi manajemen e-penyidikan, belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang merata. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan pemecahan masalah melalui strategi mengoptimalkan penerapan e-manajemen penyidikan secara transparan dan kompetitif serta meningkatkan kerjasama dengan CJS.
2. Kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek keterampilan tidak optimal hal tersebut berdasarkan kondisi sebagian penyidik/pembantu belum terampil dalam mengoperasikan aplikasi e-manajemen penyidikan dan kurangnya keahlian terkait teknis dan taktis penyidikan tindak pidana sehingga terkadang terjadi pelanggaran prosedur. Oleh sebab itu itu perlu dilaksanakan pemecahan masalah melalui strategi meningkatkan kemampuan penyidik dalam menggunakan aplikasi e-manajemen penyidikan, meningkatkan profesionalisme melalui Sertifikasi seluruh penyidik serta mengoptimalkan modernisasi layanan publik berbasis teknologi.
3. Kinerja Penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat kualitas manajemen e-penyidikan ditinjau dari aspek integritas tidak optimal hal tersebut berdasarkan kondisi penyidik kurang intensif melakukan input dan update data serta aplikasi e-Manajemen Penyidikan belum dilakukan secara konsisten dan komprehensif. Oleh sebab itu itu perlu dilaksanakan pemecahan masalah melalui strategi implementasi program prioritas Kapolri

mewujudkan SDM Polri yang unggul, merealisasikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri di bidang gakkum, meningkatkan sinergisitas dengan Kejaksaan, mengantisipasi pengaruh masyarakat sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik serta meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja penyidik.

## **B. Rekomendasi**

1. Merekomendasikan kepada Kabareskrim Polri u.p. Wakabareskrim Polri untuk menyelenggarakan program pelatihan rutin yang berfokus pada peningkatan pengetahuan penyidik dalam bidang e-penyidikan. Pelatihan ini dapat meliputi penggunaan perangkat lunak penyidikan, teknik investigasi digital, analisis data, dan teknologi forensik. Dalam pelatihan ini, penyidik dapat mempelajari perkembangan terkini dalam teknologi informasi yang relevan dengan penyidikan dan memperoleh keterampilan yang diperlukan.
2. Merekomendasikan kepada Kabareskrim Polri u.p. Wakabareskrim Polri untuk mendorong pembentukan tim kolaborasi di antara penyidik dengan bidang keahlian yang berbeda-beda. Tim ini dapat melibatkan penyidik yang memiliki keterampilan dan keahlian spesifik dalam e-penyidikan, seperti analis data digital, ahli forensik digital, dan ahli teknologi informasi. Kolaborasi dalam tim ini akan memungkinkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk meningkatkan manajemen e-penyidikan secara keseluruhan.
3. Merekomendasikan kepada Kabareskrim Polri u.p. Wakabareskrim Polri untuk membangun mekanisme yang efektif untuk pengaduan dan pengawasan internal dalam rangka menjaga integritas penyidik. Mekanisme ini harus memungkinkan anggota masyarakat atau pihak yang terkait untuk melaporkan pelanggaran etika atau perilaku tidak profesional, serta memberikan perlindungan bagi pelapor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

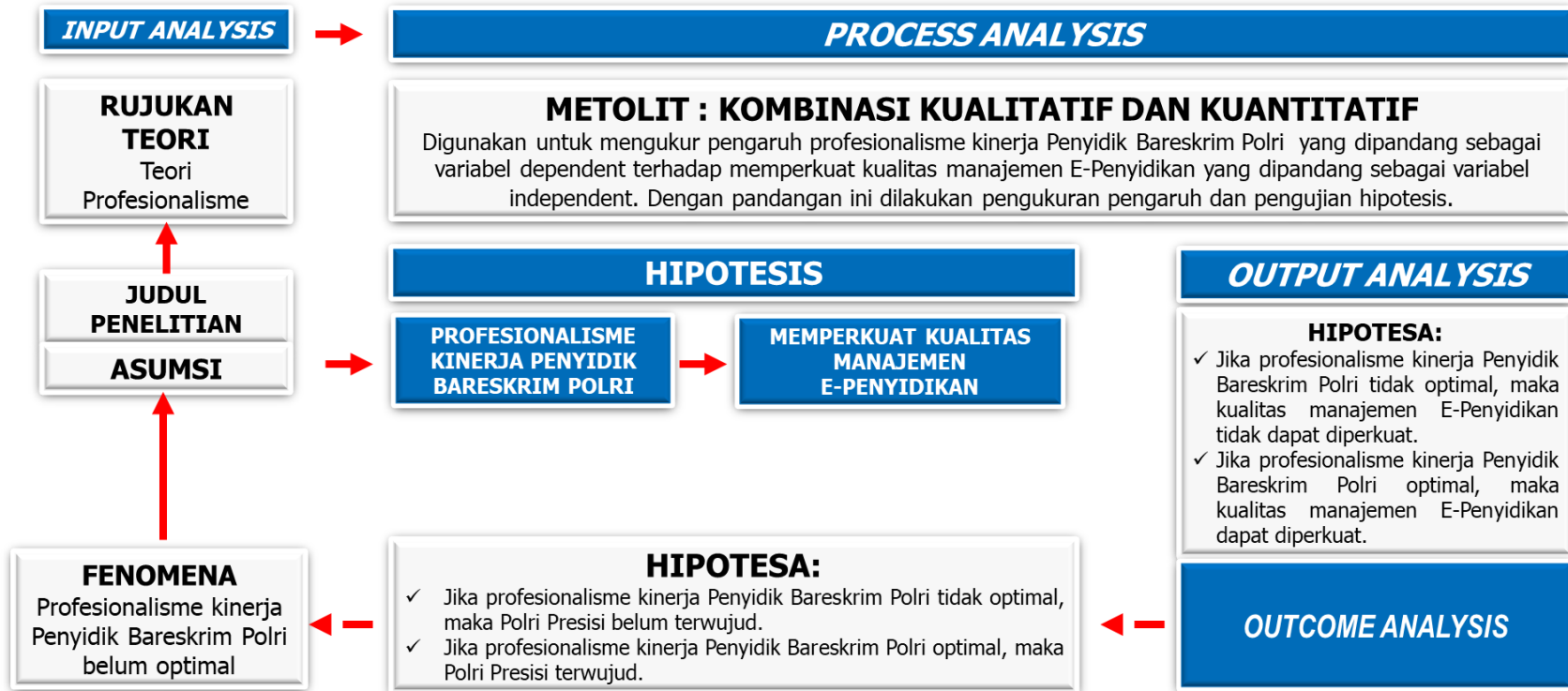
- Aminullah, & Budiyono. (2004). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah, H. (2003). Alat Evaluasi Keterampilan: Jurnal Nasional Pendidikan Jasmani dan Ilmu Keolahragaan. Jakarta: Depdiknas.
- Anwar, D. (2001). Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Abditama.
- Aziz, A. (2008). Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cahyani, A. (2009). Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Indeks.
- Depdiknas. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dr. Eko Sugiyanto, M. (2016). Pengendalian Dalam Organisasi. Jakarta: LPU-UNAS.
- DR. Setyo Riyanto, SE., MM., CPM (ASIA). 2019. Pengambilan Keputusan Strategis. Bandung: Paramedia Komunikatama.
- Gunawan, A. H. (1996). Administrasi Sekolah, Administrasi Pendidikan Mikro. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L, Manajemen Strategis, Yogyakarta: Andi.
- Moenir, A. (1992). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munandar, A. S. (2001). Psikologi Industri dan Organisasi. Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
- Purwanto, Iwan.2007. Manajemen Strategi, CV. Yrama Widya Bandung.
- Rugaiyah, & Sismiati, A. (2011). Profesi Kependidikan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riyanto, Setyo. (2018). Strategic Decision Making Using SWOT Analysis (EFAS, IFAS, and SFAS Approach with AHP). Program Doctoral. Universitas Padjajaran. Bandung.
- S, A. (2005). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S, N. (2017). Studi Kasus: Telaah Buku Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer) oleh Jujun S. Suriasumantri. Yogyakarta: Universitas Gajahmada.

- Stewart, 1998. Kerjasama Merupakan Bagian Dari Kecakapan "Manajemen Baru" Yang Belum Nampak Pada Manajemen Tradisional
- Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Agustinus Sri. (2013)., Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik. Tangerang Selatan: Binarupa Aksara Publisher.
- Yuliana. (2017). Konsep Dasar Pengetahuan. Surakarta: Cipta Graha (Revisi cetakan ke-2).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri
- Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2016 tentang Kode Etik Penyidik
- Peraturan Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Polri No. 2 Tahun 2021 tentang SOTK Bareskrim Polri dan Polsek

**OPTIMALISASI PROFESIONALISME KINERJA PENYIDIK BARESKRIM POLRI  
GUNA MEMPERKUAT KUALITAS MANAJEMEN E-PENYIDIKAN  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN POLRI PRESISI**





**OPTIMALISASI PROFESIONALISME KINERJA PENYIDIK BARESKRIM POLRI  
GUNA MEMPERKUAT KUALITAS MANAJEMEN E-PENYIDIKAN  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN POLRI PRESISI**

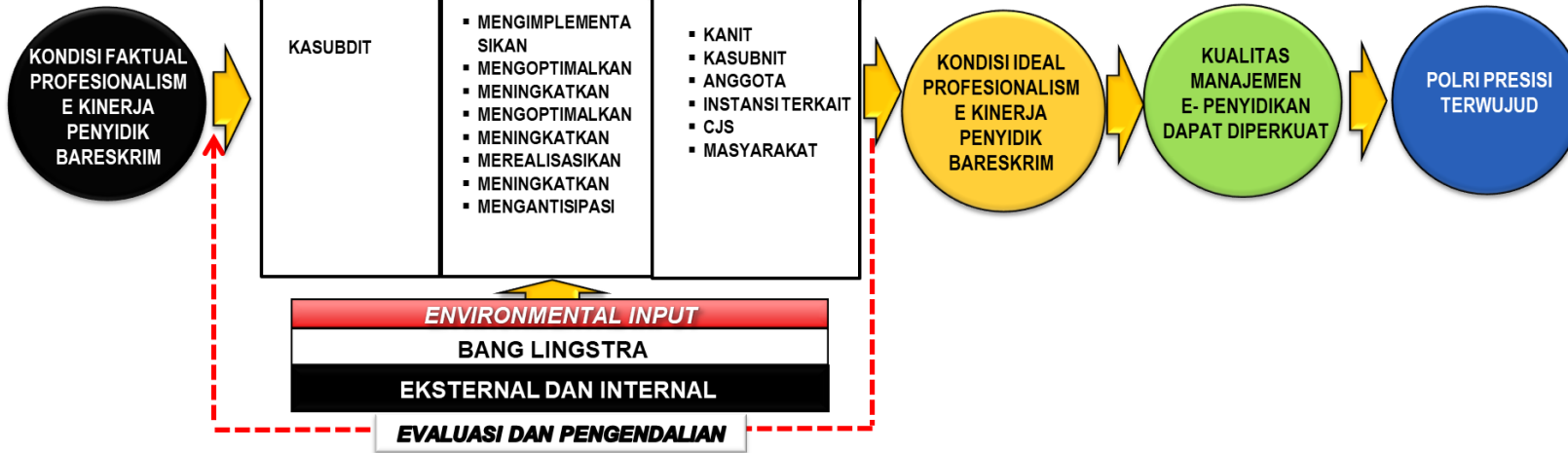


**INSTRUMENTAL INPUT**

- UU NO. 8 / 1980 TTG KUHAP
- UU NO. 2 / 2002 TTG POLRI
- PERKAP NO. 15 / 2016 TTG KODE ETIK PENYIDIK
- PERKAP NO. 6 / 2019 TTG JEMEN PENYIDIKAN TP
- PP NO. 68 / 2008 TTG TATA CARA PELAKSANAAN KERMA POLRI
- TEORI PROFESIONALISME
- TEORI PENGETAHUAN
- TEORI KETERAMPILAN
- TEORI INTEGRITAS

erj

# POLA PIKIR





## LAMPIRAN ES – OHA

EKSTERNAL (PESTEL)	INTERNAL (SDO – 4M)
<p><b>1. POLITIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Pemerintah terhadap Bareskrim Polri</li> <li>- Koordinasi CJS terjalin cukup baik</li> <li>- Kebijakan Pemerintah</li> </ul> <p><b>2. EKONOMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya kesenjangan ekonomi</li> </ul> <p><b>3. SOSIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harapan masyarakat terhadap Polri.</li> </ul> <p><b>4. TEKNOLOGI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan sistem informasi dan telekomunikasi memudahkan publikasi menerima informasi</li> </ul> <p><b>5. ENVIRONMENTAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan arus globalisasi.</li> </ul> <p><b>6. LEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemerintah</li> </ul>	<p><b>1. SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi Bareskrim Polri sudah lengkap</li> <li>- Terbatasnya kompetensi personel</li> </ul> <p><b>2. ANGGARAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inisiatif pengalokasian anggaran sudah baik mengalihkan dari alokasi kegiatan lain</li> <li>- Perencanaan dalam pengelolaan anggaran</li> </ul> <p><b>3. SARPRAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan dan sarana tumpang tindih dengan kegiatan rutin harian</li> </ul> <p><b>4. SISTEM DAN METODE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem perencanaan sudah baik namun kurang rinci</li> <li>- Pengorganisasian tugas dan peran dalam penyidikan sudah tepat namun kurang spesifik pada sasaran.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik semua aspek terlaksana, namun masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya</li> <li>- Pengendalian sudah dilaksanakan menyeluruh hanya kurang tajam</li> </ul>

## LAMPIRAN ANALISIS SWOT

EKSTERNAL		INTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN	KEKUATAN	KELEMAHAN
Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan Polri di bidang penegakan hukum mendorong Polri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyidikan	Kurang terjalin kerjasama dengan CJS (Criminal Justice System) dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga menciderai rasa keadilan hukum masyarakat	Program prioritas Kapolri salah satunya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas dan mewujudkan penyidik yang profesional	Belum semua penyidik memahami secara komprehensif tentang tata cara pemanfaatan aplikasi e-manajemen penyidikan dari tahap penyelidikan sampai berkas P-21
Terbukanya kerjasama dengan Kejaksaan dalam mendukung penyelesaian berkas perkara pidana	Perkembangan Lingstra baik nasional, regional maupun global menyebabkan munculnya kejahatan yang semakin kompleks	Komitmen pimpinan Polri sesuai penjabaran visinya untuk menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan	Anggota masih terjebak dalam budaya kerja lama yang masih memanfaatkan sistem manual dalam membuat produk administrasi penyidikan
Adanya kontrol eksternal dari, Kompolnas, Komnas HAM, serta LSM, yang dapat memotivasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri khususnya fungsi reskrim	Masih berkembangnya penilaian negatif / lebelling masyarakat termasuk masih tingginya komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik Polri	Modernisasi dalam layanan publik berbasis teknologi yang direalisasikan melalui penerapan e-manajemen penyidikan yang terintegrasi di semua level satwil	Penerapan e-Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Bareskrim Polri selama ini masih belum sepenuhnya berjalan secara transparan dan kompetitif
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kualitas penyidikan dan kinerja penyidik	Masih adanya birokrasi yang rumit dari instansi tertentu yang menghambat kecepatan proses penyidikan tindak pidana dan penyelesaian perkara	Telah adanya fungsi-fungsi pembinaan SDM baik secara struktural maupun fungsional guna meningkatkan kualitas anggota Polri	Kurangnya kualifikasi pendidikan kejuruan para penyidik pelatihan khusus dalam membuat administrasi penyidikan menggunakan aplikasi e-manajemen penyidikan
Penyelenggaraan reformasi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi dan kelembagaan pemerintah termasuk Polri	Masih adanya upaya masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan penyimpangan/ menyalahgunakan wewenang	Diberikan kesempatan kepada seluruh penyidik untuk pengembangan kompetensi baik melalui pendidikan maupun pelatihan	Sebagian Penyidik Bareskrim Polri masih banyak yang belum memiliki sertifikasi / belum lulus dalam mengikuti uji kompetensi guna mewujudkan sumber daya penyidik yang profesional

## LAMPIRAN AHP

### EFAS

NO	PELUANG ( <i>OPPORTUNITIES</i> )	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
A	Tuntutan masy yg semakin tinggi	1,00	7/8	8/7	7/8	7/6	0,20	0,20	0,20	0,19	0,21	0,100	7	0,700
B	Terbukanya kerma dgn CJS / Kejaksaan	8/7	1,00	8/7	7/6	7/6	0,23	0,22	0,20	0,25	0,21	0,112	8	0,896
C	Kontrol eksternal thdp kinerja penyidik	7/8	7/8	1,00	7/8	6/7	0,17	0,20	0,18	0,19	0,16	0,089	7	0,623
D	PerkembanganIPTEK	8/7	6/7	8/7	1,00	8/6	0,23	0,19	0,20	0,21	0,24	0,108	7	0,756
E	Reformasi nasional jadi dasar Reformasi Polri	6/7	6/7	7/6	6/8	1,00	0,17	0,19	0,21	0,16	0,18	0,091	6	0,546
<b>JUMLAH</b>												0,500		3,521

NO	ANCAMAN ( <i>THREATS</i> )	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
A	Krg terjalin kerma dgn CJS	1,00	2/3	2/3	3/2	4/3	0,18	0,16	0,11	0,28	0,21	0,095	3	0,285
B	Perkembangan lingstra	3/2	1,00	4/2	2/3	4/2	0,28	0,24	0,34	0,13	0,31	0,129	4	0,516
C	Penilaian negative masy thdp kinerja penyidik	3/2	2/4	1,00	3/2	2/3	0,28	0,12	0,17	0,28	0,10	0,095	2	0,190
D	Birokrasi rumit instansi tertentu dlm proses sidik	2/3	3/2	2/3	1,00	3/2	0,12	0,36	0,11	0,19	0,23	0,102	3	0,306
E	Msh ada upaya masy pengaruhi penyidik	3/4	2/4	3/2	2/3	1,00	0,14	0,12	0,26	0,13	0,15	0,079	3	0,237
<b>JUMLAH</b>												0,500		1,534
<b>TOTAL</b>												1,000		<b>5,055</b>

## IFAS

NO	KEKUATAN ( <i>STRENGTHS</i> )	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		BOBOT	RATING	SKOR
A	Program prioritas Kapolri	1,00	8/7	8/6	6/7	8/7		0,21	0,21	0,26	0,18	0,21		0,108	7	0,756
B	Komitmen pimpinan Polri	7/8	1,00	6/8	6/7	7/6		0,19	0,18	0,15	0,18	0,22		0,092	8	0,736
C	Modernisasi layanan publik berbasis teknologi	6/8	8/6	1,00	8/7	7/8		0,16	0,24	0,20	0,24	0,16		0,100	6	0,600
D	Fungsi-fungsi pembinaan SDM	7/6	7/6	7/8	1,00	8/7		0,25	0,21	0,17	0,21	0,21		0,106	7	0,742
E	Kesempatan pengembangan kompetensi	7/8	6/7	8/7	7/8	1,00		0,19	0,16	0,22	0,18	0,19		0,094	7	0,658
<b>JUMLAH</b>													0,500		3,492	

NO	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESSES</i> )	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		BOBOT	RATING	SKOR
A	Blm pahami scr komprehensif e-jemen sidik	1,00	3/4	3/2	3/2	2/3		0,19	0,20	0,28	0,24	0,11		0,103	4	0,412
B	Anggt msh terjebak budaya lama buat dikumen	4/3	1,00	3/2	3/2	3/2		0,26	0,27	0,28	0,24	0,24		0,129	3	0,387
C	E-manajemen sidik blm transparan & kompetitif	2/3	2/3	1,00	3/2	3/2		0,13	0,18	0,19	0,24	0,24		0,098	3	0,294
D	Krg kualifikasi dikjur dan pelatihan khusus	2/3	2/3	2/3	1,00	3/2		0,13	0,18	0,13	0,16	0,24		0,084	2	0,168
E	Sbagian besar penyidik blm miliki ser	3/2	2/3	2/3	2/3	1,00		0,29	0,18	0,13	0,11	0,16		0,086	3	0,258
<b>JUMLAH</b>													0,500		1,519	
<b>TOTAL</b>													1,000		5,011	

## LAMPIRAN MANAJEMEN RISIKO

### 1. TABEL KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

NO	KEGIATAN	TIMELINE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat Berkala	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Rapat Insidentil	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
3.	FGD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X
4.	Membangun Sistem Informasi Manajemen Risiko												
	a. Membangun budaya risiko	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Review MR	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Update Data	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelaporan	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2. PENETAPAN KONTEKS

KONTEKS MANAJEMEN RISIKO (OPTIMALISASI PROFESIONALISME KINERJA PENYIDIK BARESKRIM POLRI)	
Nama Pemilik risiko	:
Jabatan Pemilik Risiko	: KASUBDIT PADA DIT TIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
Unit Organisasi	: BARESKRIM POLRI
Ruang Lingkup Penerapan	: MENINGKATKAN PROFESIONALISME KINERJA PENYIDIK
Periode Penerapan	: OKTOBER - DESEMBER 2024

### 2.1 Sasaran dan Proses Organisasi.

NO	DAFTAR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROSES BISNIS
1.	Penguatan kompetensi penyidik dan penyidik pembantu	a. Tercapainya penyidik yang profesional	a. Melaksanakan sertifikasi penyidik di lingkungan internal Bareskrim Polri.

## 2.2 Struktur Manajemen Risiko.

NO	PERAN DALAM MANAJEMEN RISIKO	JABATAN	NAMA
1.	Pemilik Risiko	KASUBDIT PADA DIT TIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI	KASUBDIT PADA DIT TIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
2.	Pengelola Risiko	KASUBBAG RENMIN	KASUBBAG RENMIN

## 2.3 Daftar Pemangku Kepentingan.

NO	STAKEHOLDER/PEMANGKU KEPENTINGAN	HUBUNGAN
1	UNIVERSITAS	PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEMAMPUAN PENYIDIK
2	LEMBAGA PELATIHAN	PENYELENGGARA SERTIFIKASI PROFESI

## 2.4 Daftar Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait.

NO	PERATURAN TERKAIT	AMANAT PERATURAN YANG TERKAIT UNIT
1	Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri	MEWUJUDKAN SDM POLRI YG PROFESIONAL
2	Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2016 tentang Kode Etik Penyidik	INTEGRITAS PENYIDIK
3	Peraturan Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana	SISTEM, MANAJEMEN, DAN STANDAR KEBERHASILAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

## 2.5 Kriteria Risiko.

### 2.5.1 Kriteria Kemungkinan

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah Frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: kurang dari 2 kali 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: lebih dari 12 kali dalam 1 tahun

### 2.5.2 Kriteria Dampak

Area Dampak		Tingkat	Kriteria Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	<i>Fraud</i>	Kementerian				Rp. 100 Juta $\leq$ x < Rp. 1 Miliar	x $\geq$ Rp. 1 Miliar
		Eselon I				Rp. 10 Juta $\leq$ x < Rp. 100 Juta	x $\geq$ Rp. 100 Juta
		Eselon III				x < Rp. 10 Juta	x $\geq$ Rp. 10 Juta
	<i>Non Fraud</i>	Kementerian, Eselon I, Eselon II	0,01 per mil $\geq$ x	0,01 per mil < x $\leq$ 0,1 per mil	0,01 per mil < x $\leq$ 1 per mil	1 per mil < x $\leq$ 10 per mil	x > 10 per mil



Area Dampak	Tingkat					
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Penurunan Reputasi	Kementerian dan Eselon I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepercayaan stakeholders sangat baik</li> <li>• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>3,5 &lt; x \leq 4</math> (skala 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepercayaan stakeholders baik</li> <li>• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>3,25 &lt; x \leq 3,5</math> (skala 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitaan negatif di media social</li> <li>• Pemberitaan negatif di media massa local</li> <li>• Tingkat kepercayaan stakeholders sedang</li> <li>• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>3 &lt; x \leq 3,25</math> (skala 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional</li> <li>• Tingkat kepercayaan stakeholders rendah</li> <li>• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>2,5 &lt; x \leq 3</math> (skala 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepercayaan stakeholders sangat rendah</li> <li>• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>\leq 2,5</math> (skala 4)</li> </ul>

## 2.6 Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko.

### 2.6.1 Matriks Analisis Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	11	16	20	23	25
	4	Sering Terjadi	7	12	17	21	24
	3	Kadang Terjadi	4	8	13	18	22
	2	Jarang Terjadi	2	5	9	14	19
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	6	10	15

### 2.6.2 Level Risiko.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	21-25	Merah
Tinggi (4)	16-20	Oranye
Sedang (3)	11-15	Biru
Rendah (2)	6-10	Kuning
Sangat Rendah (1)	1-5	Hijau

### 3. IDENTIFIKASI RISIKO




Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak terhadap organisasi.
Risiko Keuangan Negara dan Kekayaan Negara	Berkaitan kondisi fiskal pemerintah meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepebeanaan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah dan kekayaan negara lainnya.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum kepada organisasi atau jabatan
Risiko Fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang barang/harta, jasa yang dilakukan oleh satu
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu

### 3.1 Profil Risiko.

#### Formulir Peta Risiko

Unit Organisasi : BARESKRIM POLRI  
 Periode Penerapan : OKTOBER-DESEMBER 2024

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Efektivitas Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	LR	Prioritas Risiko	Risiko Residual Harapan			Keputusan Mitigasi	Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No	Kejadian	Penyebab	Dampak				LK	Penjelasan	LD	Penjelasan				LK	LD	LR		Nama	Batasan Nilai
Peng uatan kompetensi PJU	1	TDK ADA DIKLARIT PIM	KRG KOO RDIN ASI	TDK TER CAP AI TUJUAN ORGANISASI	RISIKO KEBIJAKAN	UU 34/2004 UU 3/2002 Petunjuk induk teritorial;	KURANG EFEKTIF	3	KADANG TERJADI	4	SIGNIFIKAN	18	TINGGI	R1	2	3	9	YA	FREKUENSI KOO RDIN ASI	BATAS AMAN = 3X /3BLN BATAS ATAS = 6 X /3BLN BATAS BAWAH = 1 X /3BLN

-  Identifikasi Risiko
-  Evaluasi Risiko
-  Analisis Risiko + Peta Risiko

### 3.2 Peta Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	11	16	20	23	25
	4	Sering Terjadi	7	12	17	21	24
	3	Kadang Terjadi	4	8	13	18	22
	2	Jarang Terjadi	2	5	9	14	19
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	6	10	15

#### 4. ANALISIS RISIKO.

Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

R 1 (diisi dengan angka urutan risiko)	<i>Does the control deal with (root) casue of risk and impact?</i>	<i>is the control officially documented and communicated?</i>	<i>Is the control in operation and applied consistenly?</i>	
YES	1	1	1	
PARTLY	3	2	2	
No.	6	3	3	
	3	2	2	7
Nilai 7: menunjukan eksisting control berjalan KURANG EFEKTIF (E).				

Cara Penghitungan dari Gambar di atas:

- Jika pengendalian memiliki hubungan dengan penyebab dampak risiko beri nilai 1 (yes), jika Sebagian beri nilai 3, jika tidak berhubungan sama sekali beri nilai 6;
- Jika pengendalian telah dibuatkan Peraturan dan dikomunikasikan beri nilai 1. Jika Sebagian pengendalian yang ada peraturan dan dikomunikasikan atau sudah semua dibuat aturan, namun belum dikomunikasikan beri nilai 2. Jika sama sekali belum, beri nilai 3;
- Jika seluruh pengendalian diterapkan secara konsisten, beri nilai 1. Jika Sebagian beri nilai 2. Jika tidak beri nilai 3;
- Jumlahkan nilai tersebut dan tentukan efektivitasnya dengan ketentuan:
  - Jika berjumlah 8-12 : Tidak Efektif (TE)
  - Jika berjumlah 6-7 : Kurang Efektif (KE)
  - Jika berjumlah <5 : Efektif

5. MITIGASI RISIKO.

FORMULIR MITIGASI RISIKO

Unit Organisasi : BARESKRIM POLRI  
 Periode Penerapan : OKTOBER-DESEMBER 2024

Nomor	Rencana Mitigasi							
	Kejadian Risiko	Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Keluaran	Target	Kendala	Sumber Daya Yg Dibutuhkan	Jadwal Implementasi
R1	TDK ADA SERTIFIKASI PENYIDIK	MENURUNKAN KEMUNGKINAN DAN DAMPAK	LAKUKAN KOORDINASI DGN PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL	TERLAKSANA 100%	DILAKSANAKAN SELAMA 3 BULAN 6 GIAT	TIDAK ADA	SDM, GAR, SARPRAS, REGULASI	JAN – MARET 2025

**6. PEMANTAUAN DAN REVIEW**

**6.1 Formulir Laporan Pemantauan Semesteran I (SATU) <diisi dengan semester I atau II>**

**Unit Organisasi : BARESKRIM POLRI**  
**Periode Penerapan : OKTOBER-DESEMBER 2024**

Prioritas Risiko	Mitigasi Risiko						Indikator Risiko Utama				
	Aksi / Pengendalian	Keluaran	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung jawab	Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status	Tren Risiko
R1	LAKUKAN KOORDINASI DGN PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL	TERLAKSANA 100%	DILAKS 3 BULAN	TERLAKSANANYA DIKLAT PIM	3 X SELAMA 3 BULAN	KABAG SDM	FREKUENSI KOORDINASI	BATAS AMAN = 3X /3BLN BATAS ATAS = 6 X /3BLN BATAS BAWAH = 1 X /3BLN	<3>	<HIJAU >	<MENURUN>



## 6.2 Formulir Laporan Pemantauan Tahunan.

Unit Organisasi : BARESKRIM POLRI  
 Periode Penerapan : <OKTOBER-DESEMBER 2024>

### 6.2.1 Peta Penilaian Efektivitas Penanganan.

Prioritas Risiko	Tingkat Risiko Sebelum			Risiko Residual Harapan			Tingkat Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi / Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
R1	3	4	18	2	3	9	1	2	3	<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan tingkat Risiko dari harapan dengan aktual> PENURUNAN MENURUN	<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan tingkat Risiko dari harapan dengan aktual> LR Pada risiko residual harapan dikurangi LR pada tingkat risiko aktual. $9 - 3 = 6$	-
	<diisi sesuai hasil evaluasi risiko pada formulir profil dan peta Risiko>			<diisi sesuai hasil risiko residual yang diharapkan sesuai formulir penanganan Risiko>			<diisi berdasarkan pengukuran risiko aktual setelah rencana penanganan Risiko dijalankan pada akhir tahun>					

Keterangan : LK : Level Kemungkinan; LD : Level Dampak; LR : Level Risiko

6.2.2 Peta Hasil Penanganan Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	11	16	20	23	25
	4	Sering Terjadi	7	12	17	21	24
	3	Kadang Terjadi	4	8	13	18	22
	2	Jarang Terjadi	2	5	9	14	19
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	6	10	15